

Tinjauan Komparatif Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dan School Feeding di Berbagai Negara: Literature Review

Retno Wulandari¹

Samsi Okmarizar¹, Novia Giovani¹, Masudatul Isnaini¹, Chriestien. N.H¹, Hafidh
Trianda Khan¹, Amrina Rosyada¹, Wulan Puspita Ramdhani¹, Heryudarini. H²

¹Universitas Hangtuah Pekanbaru

²Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau

retno.wulandari350@gmail.com

Received: 11/02/2026; Revised: 03/06/2026; Accepted: 09/06/2026; Published: 30/06/2026

ABSTRACT

This study aimed to critically analyze the governance of Indonesia's Free Nutritious Meal Program (MBG) in comparison with established school feeding programs in the United States, Brazil, India, and the Philippines to formulate long-term program sustainability strategies. This study employed a scoping literature review design with a descriptive-comparative approach. A systematic literature search was performed across three scientific databases (Google Scholar, Scopus, and PubMed), covering the period from 2010 to 2025. Applying strict inclusion criteria (peer-reviewed journals and official policy documents) and exclusion criteria, 11 primary scientific articles and 6 official policy documents were selected for synthesis. The analysis focused on policy and regulatory frameworks, institutional arrangements, delivery mechanisms, financing systems, and their implications for children's nutritional and educational outcomes. The review indicated that countries supported by strong legal foundations, sustainable financing, and well-functioning evaluation systems yield more stable and consistent nutritional improvements. As a newly implemented initiative, Indonesia's MBG program has significant potential to improve nutritional outcomes while strengthening local food supply chains. Nevertheless, its implementation remains challenged by infrastructure disparities, variations in human resource capacity, and suboptimal monitoring systems. This study concluded that the long-term sustainability of the MBG relies on strong governance, effective cross-sectoral coordination, and sustainable financing. Consequently, the program should consider adopting an affirmative targeting strategy that prioritizes students from low-income and vulnerable households in areas with a high prevalence of malnutrition to maximize program effectiveness and promote fiscal sustainability.

Keywords: *Comparative Study, Free Nutritious Meal Program, Nutrition Policy, School-Age Child Nutrition, School Feeding Program*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan komparatif tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan program makan sekolah yang telah lama berlaku di Amerika Serikat, Brasil, India, dan Filipina guna merumuskan strategi keberlanjutan program. Kajian ini disusun menggunakan metode *scoping literature review* dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis pada tiga database ilmiah yaitu Google Scholar, Scopus, dan PubMed dalam periode 2010-2025. Melalui seleksi ketat menggunakan kriteria inklusi (artikel jurnal terakreditasi dan dokumen kebijakan resmi) serta eksklusi, diperoleh 11 artikel ilmiah utama dan 6 dokumen regulasi pemerintah untuk disintesis. Analisis difokuskan pada aspek kerangka regulasi, kelembagaan, mekanisme pelaksanaan, sistem pendanaan, serta dampaknya terhadap gizi dan pendidikan. Hasil telaah menunjukkan bahwa negara dengan dukungan regulasi yang kuat, pembiayaan berkelanjutan, dan sistem evaluasi efektif mampu menghasilkan dampak gizi yang stabil. Sebagai program baru, MBG Indonesia berpotensi besar meningkatkan status gizi masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan lokal, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan infrastruktur, variasi kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pemantauan yang belum optimal. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan jangka panjang MBG bergantung pada tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi program perlu menerapkan pendekatan afirmatif. Prioritas sasaran harus diberikan kepada siswa dari keluarga miskin dan rentan di wilayah dengan risiko masalah gizi yang tinggi. Langkah ini penting guna meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal.

Kata kunci: Gizi Anak Sekolah, Kebijakan Gizi, Program Makan Bergizi Gratis, Program Makan Sekolah, Studi Komparatif

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang pada anak usia sekolah merupakan faktor utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan produktif. Status gizi yang optimal berperan penting dalam menjaga kesehatan, meningkatkan kemampuan konsentrasi, dan mendukung pencapaian prestasi akademik siswa. Sebaliknya, kondisi gizi yang tidak adekuat (baik kekurangan maupun kelebihan gizi) berpotensi menghambat proses dan menurunkan konsentrasi belajar anak. Berbagai studi di Indonesia menemukan adanya hubungan yang bermakna antara status gizi dan hasil belajar, di mana anak dengan status gizi baik cenderung menunjukkan capaian akademik yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mengalami gizi kurang atau gizi tidak normal (Dhafir *et al.*, 2025; Irab *et al.*, 2024; Sulistyono *et al.*, 2020). Penelitian ini menegaskan bahwa upaya perbaikan status gizi anak sekolah tidak hanya berperan terhadap kesehatan fisik, tetapi juga merupakan strategi yang tepat dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan nasional.

Sebagai upaya penanganan atas permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional yang baru mulai dilaksanakan pada tahun 2025. Pelaksanaan program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan

Gizi Nasional, serta diperkuat oleh berbagai regulasi pelaksana, antara lain Peraturan BGN Nomor 1, 2, dan 6 Tahun 2024. MBG menjadi bagian integral dari agenda strategis pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan perbaikan kualitas gizi masyarakat sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Program ini dirancang tidak hanya untuk menjamin penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, tetapi juga menyoal kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Pada dasarnya, MBG bertujuan untuk meningkatkan tercukupinya asupan gizi, menurunkan prevalensi *stunting*, mengatasi *triple burden of malnutrition* termasuk gizi kurang, gizi lebih, serta defisiensi zat gizi mikro, serta mendukung peningkatan kesiapan belajar anak di lingkungan sekolah (Badan Gizi Nasional Republik Indonesia [BGN RI], 2024). Upaya penguatan kualitas SDM dan stimulasi ekonomi berbasis sekolah ini sejalan dengan cetak biru inovasi kebijakan gizi nasional yang inklusif dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat jangka panjang (Rahmah *et al.*, 2025).

Di luar tujuan perbaikan gizi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian lokal. Program ini melibatkan pelaku UMKM pangan, koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penyedia bahan baku untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga berpotensi menciptakan

dampak pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025 (SK BGN Nomor 63 Tahun 2025), program ini menargetkan pembentukan sekitar 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Melalui jaringan layanan tersebut, diperkirakan sekitar 82,9 juta penerima manfaat meliputi peserta didik, santri pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita yang dapat memperoleh akses rutin terhadap makanan sehat setiap hari. Proses pelaksanaan MBG ini dilakukan secara bertahap dan terintegrasi lintas sektor, dengan melibatkan kerja sama antara Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, BKKBN, TNI/Polri, serta pemerintah daerah. Lokasi setiap SPPG bekerja dalam cakupan wilayah maksimal enam kilometer dari sekolah atau posyandu sasaran, dengan mekanisme distribusi makanan yang dijadwalkan selama 264 hingga 288 hari kerja efektif dalam satu tahun. Dalam pelaksanaannya, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, dan bidan desa berperan aktif dalam pendataan penerima manfaat, penyaluran makanan, serta pelaksanaan edukasi gizi di lingkungan sekolah dan masyarakat (BGN, 2025). Ditinjau dari sudut pandang tata kelola, pelaksanaan program ini dilakukan melalui skema Bantuan Pemerintah (Banper) yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam memanfaatkan anggaran publik. Mekanisme pemantauan dan evaluasi diterapkan secara berkala untuk memastikan

bahwa pelaksanaan program ini memenuhi standar gizi, ketentuan keamanan pangan, dan tata kelola operasional, dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan sisa makanan dan perlindungan lingkungan (BGN, 2025).

Program MBG yang dikembangkan di Indonesia pada dasarnya sejalan dengan berbagai inisiatif program makan sekolah di sejumlah negara yang telah lebih dahulu diterapkan dan memperlihatkan keberhasilan dalam memperbaiki status gizi sekaligus mendukung kualitas pendidikan anak. Di Amerika Serikat, program makan sekolah berawal dari situasi krisis pada masa *Great Depression* (1929–1939), ketika pemerintah berupaya merespons peningkatan angka kelaparan pada anak usia sekolah. Upaya tersebut kemudian diperkuat melalui pengesahan *National School Lunch Act* pada tahun 1946 oleh Presiden Harry S. Truman, yang menjadi dasar landasan pelaksanaan *National School Lunch Program* (NSLP). Program ini selanjutnya dilengkapi dengan *School Breakfast Program* (SBP) pada dekade 1960-an, bertujuan untuk mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan prestasi akademik siswa (Figuroa, 2024; Ralston & Coleman-Jensen, 2017). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Brasil melalui *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) yang telah berjalan sejak tahun 1940-an dan saat ini sering dijadikan rujukan internasional dalam pengelolaan program makan sekolah yang terintegrasi. PNAE tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga dirancang untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi lokal. Ketentuan yang mewajibkan minimal

30% pengadaan bahan pangan berasal dari petani keluarga menjadikan program ini berperan ganda, yaitu menjamin akses pangan bergizi bagi anak sekolah sekaligus memperkuat perekonomian pedesaan serta mendorong konsumsi pangan segar dan sehat (Silva *et al.*, 2023; Souza & Fornazier, 2022).

Di Filipina, upaya penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah dilakukan melalui *School-Based Feeding Program* (SBFP) yang dikelola oleh *Department of Education* (DepEd). Program ini dirancang untuk menekan angka *wasting* dan *underweight*, serta dalam praktiknya juga menunjukkan dampak positif terhadap tingkat kehadiran siswa dan performa belajar di sekolah. Namun, capaian program tersebut tidak selalu seragam, karena sangat dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas pengelolaan di masing-masing sekolah dan wilayah (Sadag, 2025). Pengalaman India menunjukkan skala yang jauh lebih besar melalui *Mid-Day Meal Scheme* (MDMS), sebuah program makan sekolah yang telah berjalan sejak tahun 1995 dan dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Program ini memperoleh landasan hukum yang kuat melalui *The National Food Security Act (2013)*, yang menjamin hak setiap anak sekolah dasar untuk menerima makanan bergizi setiap hari. Berbagai kajian menunjukkan bahwa MDMS berkontribusi nyata dalam meningkatkan kehadiran siswa, menekan angka putus sekolah, serta memperbaiki status gizi dan capaian akademik anak (Afridi, 2010).

Meskipun gambaran program dari berbagai negara tersebut memberikan rujukan konseptual yang sangat berharga bagi Indonesia, terdapat gap

penelitian yang mendasar dalam literatur saat ini. Sebagian besar kajian mengenai MBG di Indonesia sejauh ini masih terbatas pada deskripsi regulasi, justifikasi politik-ekonomi, atau pemodelan anggaran makro secara sepihak. Masih sangat jarang ditemukan analisis komparatif kritis yang mengupas risiko kegagalan operasional tata kelola dan tantangan transisi gizi berdasarkan rekam jejak empiris negara lain yang telah berjalan puluhan tahun. Indonesia sendiri dihadapkan pada realitas beban gizi ganda yang kompleks, di mana kerentanan populasi anak sekolah dasar hingga menengah (usia remaja) di wilayah urban cenderung bergeser pada risiko gizi lebih (obesitas) akibat tingginya konsumsi produk pangan olahan (*ultra-processed foods*), sementara kasus gizi kurang masih persisten di wilayah rural. Karakteristik geografis kepulauan dan ketimpangan infrastruktur sekolah di Indonesia memiliki kemiripan signifikan dengan tantangan struktural yang dihadapi Filipina dan India. Tanpa adanya sintesis komparatif yang kritis mengenai faktor kunci keberhasilan (*best practices*) serta manajemen risiko dari negara-negara tersebut, operasionalisasi MBG di Indonesia berisiko mengalami stagnasi yang dapat mengaburkan capaian luaran gizi klinis anak secara nasional.

Berdasarkan kesenjangan riset tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dan komparatif tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia melalui perbandingan dengan program makan sekolah di Amerika Serikat, Brasil, India, dan Filipina. Melalui pendekatan deskriptif-komparatif, studi ini mengidentifikasi faktor risiko

operasional, mengekstrak praktik terbaik internasional, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah demi menjamin keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang program MBG di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *scoping literature review* dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menelaah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia serta membandingkannya dengan program makan di sekolah yang telah diterapkan di Amerika Serikat, Brasil, India, dan Filipina. Sesuai dengan prinsip studi deskriptif-komparatif menurut Sastroasmoro & Ismael (2024), pendekatan ini digunakan secara sistematis untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih kelompok fenomena, guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi suatu kebijakan tanpa memberikan perlakuan khusus pada objek penelitian. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik masing-masing program, termasuk persamaan dan perbedaannya, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala implementasi dalam konteks kebijakan gizi berbasis sekolah.

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis dokumen dengan desain tinjauan komparatif lintas negara (*cross-country comparative review*). Analisis difokuskan pada sejumlah dimensi utama, yaitu kerangka kebijakan, pengaturan kelembagaan, mekanisme pelaksanaan program, ketersediaan sumber daya, serta capaian yang dihasilkan oleh program

makan bergizi di Negara-Negara yang menjadi objek kajian.

Data yang digunakan bersumber dari bahan sekunder yang relevan, mencakup dokumen resmi pemerintah dan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, *United States Department of Agriculture* (USDA), *Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação* (FNDE) di Brasil, *Ministry of Education* di India, serta *Department of Education* (DepEd) di Filipina. Selain itu, kajian ini juga memanfaatkan artikel ilmiah dan laporan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi, serta berbagai regulasi dan pedoman pelaksanaan program, antara lain Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, *Richard B. Russell National School Lunch Act* di Amerika Serikat, *Law No. 11.947/2009* di Brasil, *National Food Security Act* Tahun 2013 di India, dan *DepEd Order No. 39 s.2017* di Filipina.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis yang mengadopsi prinsip protokol *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) tanpa visualisasi diagram, yang disesuaikan untuk studi berbasis kebijakan dokumen. Penelusuran dilakukan pada berbagai basis data ilmiah, termasuk Google Scholar, Scopus, dan PubMed, serta melalui laman resmi instansi pemerintah terkait. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci terstruktur dengan operator Boolean sebagai berikut: ("school feeding program" OR "school meal" OR "makan

bergizi gratis") AND ("nutrition policy" OR "child nutrition" OR "kebijakan gizi") AND ("Indonesia" OR "United States" OR "Brazil" OR "India" OR "Philippines").

Proses seleksi literatur dilakukan secara ketat melalui empat tahapan sistematis. Pertama, tahap identifikasi mengumpulkan seluruh dokumen dan artikel yang muncul dari basis data. Kedua, tahap penyaringan (*screening*) dilakukan berdasarkan judul dan abstrak untuk mengeliminasi artikel duplikat atau yang tidak relevan. Ketiga, tahap penilaian kelayakan (*eligibility*) diterapkan menggunakan kriteria inklusi, yaitu: (1) diterbitkan dalam periode 2010–2025; (2) membahas langsung mengenai implementasi, efektivitas, regulasi, atau dampak klinis/akademis program makan bergizi di sekolah pada negara target; (3) ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris; serta (4) dapat diakses secara utuh (*full-text*). Kriteria eksklusi meliputi artikel opini, ulasan berita populer, dan studi yang tidak menyertakan data evaluasi kebijakan.

Keempat, tahap inklusi akhir berhasil menetapkan 11 artikel ilmiah utama serta 6 dokumen regulasi dan kebijakan resmi pemerintah untuk disintesis. Setiap sumber yang memenuhi kriteria tersebut kemudian ditelaah secara mendalam untuk mengidentifikasi aspek input, proses, output, dan *outcome*, sekaligus mengungkap berbagai isu dan tantangan dalam pelaksanaan program di masing-masing negara.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui proses penelaahan dan perbandingan terhadap sejumlah indikator kunci dari setiap program.

Aspek yang dianalisis meliputi kebijakan dan pola pendanaan, struktur kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, serta dampaknya terhadap status gizi, tingkat kehadiran, dan prestasi belajar siswa. Proses pengelompokan variabel kontras ini dipetakan secara terstruktur berdasarkan prinsip pembagian kelompok studi komparatif (Sastroasmoro & Ismael, 2024). Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel matriks komparatif dan uraian deskriptif kritis yang menggambarkan keunggulan dan keterbatasan masing-masing program, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan rujukan dalam upaya penguatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Analisis Perbandingan Program MBG Indonesia Dengan Program Di Negara Lainnya

Komponen	Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis	Amerika Serikat – School Feeding (NSLP & SBP)	Brazil - (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)	India - Mid-Day Meal Scheme (MDMS)	Filipina-School-Based Feeding Program (SBFP)
Input	<p>a. Kerangka kebijakan nasional yang ditetapkan melalui keputusan Presiden dan diperkuat oleh berbagai regulasi pelaksana</p> <p>b. Dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)</p> <p>c. Keterlibatan sumber daya manusia, meliputi guru, tenaga pengelola dapur sekolah, kader masyarakat, serta mitra dari pelaku UMKM</p> <p>d. Pemanfaatan bahan pangan lokal, seperti beras, telur, ikan, sayuran, dan susu, sebagai sumber utama penyediaan makanan</p> <p>e. Ketersediaan sarana pendukung, termasuk dapur sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).</p> <p>f. Sasara semua siswa sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SLTP, dan SLTA</p>	<p>a. Landasan hukum berupa undang-undang federal, yaitu <i>Richard B. Russell National School Lunch Act</i>, yang menjadi dasar pelaksanaan program</p> <p>b. Skema pembiayaan yang bersumber dari anggaran federal melalui USDA, dengan dukungan tambahan dari pemerintah negara bagian</p> <p>c. Ketersediaan tenaga profesional, seperti ahli gizi dan pengelola layanan makanan sekolah</p> <p>d. Penggunaan bahan pangan yang telah memenuhi standar mutu dan memperoleh dukungan subsidi</p> <p>e. Infrastruktur dapur sekolah yang telah berkembang dengan baik dan beroperasi secara stabil</p> <p>f. Pemberian bantuan pada makanan sekolah pada siswa kepada siswa yang membutuhkan (subsidi sesuai dengan pendapatan orang tua)</p>	<p>a. Dasar hukum program yang ditetapkan melalui <i>Law No. 11.947/2009</i> dan diperkuat oleh <i>Decree No. 37.106/1955</i></p> <p>b. Pembiayaan program yang dikelola melalui <i>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação</i> (FNDE)</p> <p>c. Kewajiban keterlibatan tenaga ahli gizi dalam pelaksanaan program di setiap sekolah</p> <p>d. Pemanfaatan bahan pangan yang bersumber dari petani keluarga, dengan ketentuan minimal 30 persen anggaran dialokasikan untuk pengadaan ini</p> <p>e. Ketersediaan sarana pendukung, meliputi dapur sekolah, fasilitas penyimpanan, peralatan memasak, serta sistem logistic</p> <p>f. Sasaran mencakup seluruh siswa pendidikan dasar pada sekolah negeri dan sekolah yang memenuhi kriteria program</p> <p>g. Integrasi kegiatan edukasi gizi dan pengelolaan kebun sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran (Silva <i>et al.</i>, 2021; Souza & Fornazier, 2022)</p>	<p>a. Kerangka hukum utama yang bersumber dari <i>National Food Security Act</i> Tahun 2013 sebagai dasar perlindungan hak pangan anak sekolah</p> <p>b. Aturan teknis pelaksanaan program yang diatur dalam <i>Mid-Day Meal Rules</i> Tahun 2015</p> <p>c. Penguatan aspek legal melalui putusan Mahkamah Agung India dalam perkara <i>PUCL v. Union of India</i> Tahun 2001</p> <p>d. Pedoman operasional terbaru yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan <i>PM POSHAN</i> Tahun 2021</p> <p>e. mencakup seluruh siswa sekolah pemerintah dan sekolah berbantuan pemerintah dari jenjang tertentu, dengan tujuan khusus membantu kelompok miskin dan rentan</p>	<p>a. Program dilaksanakan di bawah koordinasi <i>Department of Education</i> (DepEd) dengan mengacu pada <i>DepEd Order No. 39 s. 2017</i> sebagai pedoman operasional SBFP.</p> <p>b. Skema pendanaan tidak dijabarkan secara rinci dalam studi, namun program berada dalam lingkup anggaran DepEd.</p> <p>c. Pelaksanaan di tingkat sekolah melibatkan kepala sekolah, guru, pengurus <i>Parent-Teacher Association</i> (PTA), serta tenaga pendukung lainnya.</p> <p>d. Studi merekomendasikan penambahan susu harian dalam menu sekolah untuk memperkuat dampak perbaikan gizi.</p> <p>e. Keterbatasan sarana pendukung, terutama fasilitas ruang makan dan peralatan makan, masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program di sekolah sasaran.</p> <p>f. Sasaran difokuskan pada anak <i>wasted</i>, <i>severely wasted</i>, dan kelompok kurang gizi tertentu; belakangan diperluas ke seluruh siswa TK dan</p>

Komponen	Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis	Amerika Serikat – <i>School Feeding (NSLP & SBP)</i>	Brazil - (<i>Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE</i>)	India - <i>Mid-Day Meal Scheme (MDMS)</i>	Filipina- <i>School-Based Feeding Program (SBFP)</i>
Proses	<p>a. Penyusunan menu dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan gizi sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).</p> <p>b. Proses pengolahan makanan dilaksanakan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang telah ditetapkan.</p> <p>c. Penyaluran makanan ke sekolah atau langsung kepada peserta didik dilakukan setiap hari melalui mitra distribusi.</p> <p>d. Pelaksanaan program dipantau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>	<p>a. Penyusunan menu mengacu pada <i>Dietary Guidelines for Americans</i> sebagai pedoman gizi nasional.</p> <p>b. Pengadaan bahan pangan dilakukan melalui skema kontrak, baik di tingkat nasional maupun lokal.</p> <p>c. Makanan disiapkan dan disajikan langsung di lingkungan sekolah.</p> <p>d. Pelaksanaan program berada di bawah pengawasan ketat USDA dan dievaluasi melalui audit yang dilakukan secara rutin.</p>	<p>a. Menu disusun oleh tenaga gizi dengan mempertimbangkan pedoman gizi serta ketersediaan bahan pangan di tingkat lokal.</p> <p>b. Pengadaan bahan pangan dilakukan melalui sistem pengadaan pemerintah, dengan penekanan pada penggunaan bahan segar dari petani keluarga.</p> <p>c. Proses memasak dan penyaluran makanan berlangsung di dapur sekolah, kemudian makanan disajikan langsung kepada siswa.</p> <p>d. Kegiatan edukasi gizi menjadi bagian dari proses pembelajaran, termasuk melalui pemanfaatan kebun sekolah.</p> <p>e. Pelaksanaan program dipantau oleh pemerintah kota bersama <i>Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)</i> (Silva Junior <i>et al.</i>, 2021; Azevedo <i>et al.</i>, 2023).</p>	<p>a. Penetapan menu dilakukan oleh pemerintah negara bagian dengan mengacu pada pedoman gizi nasional sebagaimana tercantum dalam <i>National Food Security Act 2013</i>.</p> <p>b. Penyediaan bahan pangan utama, seperti beras atau gandum, difasilitasi oleh <i>Food Corporation of India (FCI)</i>.</p> <p>c. Proses memasak dilaksanakan di dapur sekolah (<i>kitchen-cum-store</i>) oleh tenaga masak yang telah ditunjuk.</p> <p>d. Makanan dibagikan langsung kepada siswa di sekolah pada waktu makan siang, dengan prinsip inklusivitas tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, atau jenis kelamin.</p> <p>e. Pelaksanaan program dipantau secara bersama oleh orang tua, pihak sekolah, kelompok swadaya masyarakat (<i>Self-Help Groups</i>), serta komunitas lokal sesuai pedoman PM POSHAN (Ministry of Education, 2022)</p>	<p>sebagian siswa rentan lainnya.</p> <p>a. Perencanaan menu mengacu pada pedoman operasional SBFP sebagaimana tercantum dalam <i>DepEd Order No. 39 s. 2017</i>.</p> <p>b. Sasaran program ditentukan berdasarkan indikator gizi wasting dan severely wasted sesuai standar antropometri WHO.</p> <p>c. Proses pengolahan makanan di dapur sekolah dinilai berjalan baik, mencakup praktik pemberian makan, keamanan pangan, serta sistem penyimpanan.</p> <p>d. Penyaluran makanan dilakukan langsung di sekolah sebagai bagian dari kegiatan utama pemberian makan.</p> <p>e. Pemantauan oleh pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan, dengan pelaporan program yang belum sepenuhnya optimal.</p>
Output	<p>a. Peserta didik memperoleh makanan bergizi tanpa biaya selama mengikuti kegiatan sekolah.</p> <p>b. Program berkontribusi pada peningkatan kecukupan energi dan protein harian anak.</p>	<p>a. Program menyediakan layanan makan siang dan sarapan bagi jutaan siswa setiap harinya.</p> <p>b. Kebutuhan gizi dasar peserta didik dapat terpenuhi</p>	<p>a. Makanan bergizi tersalurkan di semua sekolah negeri.</p> <p>b. 70% menu memenuhi standar gizi dan rendah olahan; 25-30% masih <i>ultra-processed</i> (Azevedo <i>et al.</i>, 2023)</p> <p>c. Meningkatnya permintaan produk lokal dan pendapatan petani</p>	<p>a. Berdasarkan laporan <i>Global Child Nutrition Foundation (2021)</i>, hal ini memperkuat nilai inklusi sosial di sekolah dasar.</p> <p>b. Program melibatkan lebih dari 2,5 juta perempuan sebagai <i>cook-cum-helpers</i>,</p>	<p>a. Program pemberian makanan di sekolah dinilai berjalan baik dan telah diterapkan secara luas di sekolah yang menjadi lokasi studi.</p> <p>b. Dampak yang dilaporkan lebih menekankan pada</p>

Komponen	Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis	Amerika Serikat – School Feeding (NSLP & SBP)	Brazil - (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)	India - Mid-Day Meal Scheme (MDMS)	Filipina-School-Based Feeding Program (SBFP)
	c. Pelaksanaan program turut mendukung ketersediaan dan pemanfaatan pangan di tingkat lokal.	melalui penyediaan makanan tersebut. c. Mutu serta keamanan pangan dijaga melalui penerapan standar yang telah ditetapkan.	kecil (Souza and Fornazier, 2022). d. Menu berbasis nabati menurunkan emisi karbon hingga 17% tanpa menurunkan nilai gizi (Kluczkovski <i>et al.</i> , 2022).	meningkatkan pendapatan keluarga miskin. c. Hal ini turut meningkatkan standar sanitasi di lingkungan sekolah.	pelaksanaan program serta perbaikan kategori status gizi anak. c. Aspek ketahanan pangan lokal belum menjadi fokus utama dalam kajian ini.
Outcome	a. Program berpeluang membantu menekan berbagai masalah gizi, seperti stunting, wasting, dan anemia. b. Pelaksanaannya dikaitkan dengan peningkatan daya konsentrasi serta kehadiran siswa di sekolah. c. Namun, hasil yang dicapai belum merata dan masih berbeda antarwilayah.	a. Program menunjukkan dampak nyata dalam perbaikan status gizi sekaligus peningkatan capaian belajar siswa. b. Tingkat kerentanan pangan pada anak dapat ditekan melalui pelaksanaan program. c. Pelaksanaannya relatif efektif dan hasilnya cenderung konsisten di berbagai wilayah.	a. Program mendorong peningkatan konsumsi bahan pangan segar sekaligus membantu mengurangi kerawanan pangan pada rumah tangga berpendapatan rendah. (Silva <i>et al.</i> , 2023). b. Program ini membangun pola pembelajaran dan kerja sama antara petani, sekolah, dan pemerintah dalam mendukung sistem pangan c. yang berkelanjutan. Dampaknya nyata dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya akses pangan sehat dan berkelanjutan.	a. Setelah program MDMS berjalan dengan pemberian makanan matang setiap hari, partisipasi sekolah di wilayah pedesaan meningkat nyata, yang ditandai dengan lonjakan tingkat kehadiran bulanan secara spesifik pada siswa perempuan hingga lebih dari 12 poin persentase (Afridi, 2011) b. Intervensi berkelanjutan terhadap program makan siang di sekolah ini menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap perbaikan status gizi anak, secara spesifik menurunkan prevalensi malnutrisi kronis seperti <i>underweight</i> dan <i>stunting</i> (Chakrabarti <i>et al.</i> , 2021) c. Asupan makan siang yang bergizi membuat siswa lebih berenergi dan mampu berkonsentrasi lebih baik selama	a. Program ini berpotensi memperbaiki masalah gizi, khususnya wasting. Jumlah anak wasted dan severely wasted memang menurun dari 71 menjadi 49, tetapi secara statistik penurunannya belum bermakna ($p=0,303$). b. Dampak terhadap konsentrasi dan kehadiran siswa disebutkan positif, namun pada wilayah Kabugao District II, hasil yang dilaporkan lebih menekankan pada keterlaksanaan program dan perubahan status gizi, bukan data spesifik kehadiran atau capaian akademik. c. Efektivitas program tidak merata antar wilayah dan jenis sekolah. Sekolah multigrade dan sekolah lengkap menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan monograde dan primary. Jumlah guru juga berpengaruh, sementara lemahnya keterlibatan pemangku kepentingan,

Komponen	Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis	Amerika Serikat - School Feeding (NSLP & SBP)	Brazil - (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)	India - Mid-Day Meal Scheme (MDMS)	Filipina-School-Based Feeding Program (SBFP)
				kegiatan belajar di kelas.	keterbatasan infrastruktur, dan inkonsistensi pelaksanaan membatasi dampak program.

Tabel 2.
Permasalahan Dan Tantangan Program Makan Bergizi Gratis Indonesia Dengan Program Di Negara Lainnya

Komponen	Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis	Amerika Serikat - School Feeding (NSLP & SBP)	Brazil - (Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)	India - Mid-Day Meal Scheme (MDMS)	Filipina-School-Based Feeding Program (SBFP)
Permasalahan dan Tantangan	<p>a. Ketersediaan infrastruktur masih timpang antar wilayah, terutama antara daerah maju dan tertinggal.</p> <p>b. Kualitas dan jumlah SDM, termasuk dukungan logistik, belum merata di semua lokasi pelaksanaan.</p> <p>c. Masih terdapat potensi pemborosan pangan serta risiko terkait keamanan dan higienitas makanan.</p> <p>d. Sistem pengawasan mutu belum berjalan konsisten dan standar penerapannya berbeda-beda antar daerah.</p> <p>e. Penentuan sasaran program perlu didasarkan pada pendekatan afirmatif dengan memprioritaskan</p>	<p>a. Biaya operasional program relatif besar dan menjadi beban berkelanjutan.</p> <p>b. Tidak semua siswa menerima menu sehat dengan baik, sehingga konsumsi belum selalu optimal.</p> <p>c. Keberlangsungan program sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.</p> <p>d. Pengembangan menu yang sehat sekaligus menarik bagi siswa masih menjadi tantangan tersendiri.</p>	<p>a. Hambatan birokrasi dan keterlambatan pengadaan (Silva <i>et al.</i>, 2021).</p> <p>b. Keterbatasan SDM ahli gizi di wilayah terpencil.</p> <p>c. Infrastruktur logistik dan penyimpanan pangan segar kurang memadai (Souza and Fornazier, 2022).</p> <p>d. Variasi kualitas hasil tani lokal dan ketimpangan implementasi antar daerah.</p> <p>e. Keterbatasan sistem pemantauan terpadu (Silva <i>et al.</i>, 2023).</p>	<p>a. Menjaga kualitas bahan pangan masih menjadi tantangan, terutama pada tahap penyimpanan.</p> <p>b. Banyak sekolah, terutama di wilayah pedesaan, belum memiliki dapur permanen yang memadai untuk kegiatan memasak.</p> <p>c. Penyaluran dana operasional tidak selalu tepat waktu, sehingga pembelian bahan makanan kerap tertunda.</p> <p>d. Keterbatasan jumlah petugas pengawas di lapangan membuat pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program kurang akurat.</p> <p>e. Variasi menu cenderung terbatas karena pasokan utama</p>	<p>a. Fasilitas makan dan peralatan di sekolah masih terbatas, sehingga pelaksanaan feeding tidak optimal.</p> <p>b. Ketersediaan tenaga belum memadai; di sekolah kecil guru sering merangkap tugas program, yang memperberat beban kerja.</p> <p>c. Peran orang tua relatif rendah karena keterbatasan waktu, sehingga kolaborasi program kurang kuat.</p> <p>d. Sistem pemantauan dan pelaporan belum berjalan penuh dan masih perlu diperkuat.</p> <p>e. Pelaksanaan program tidak merata antar jenis sekolah akibat perbedaan sumber daya.</p>

Komponen	Indonesia - Program Makan Bergizi Gratis	Amerika Serikat - <i>School Feeding (NSLP & SBP)</i>	Brazil - <i>(Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE)</i>	India - <i>Mid-Day Meal Scheme (MDMS)</i>	Filipina - <i>School-Based Feeding Program (SBFP)</i>
	peserta didik yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan wilayah dengan prevalensi masalah gizi tinggi.			masih bergantung pada beras atau gandum dari <i>Food Corporation of India (FCI)</i> .	

1. Gambaran umum implementasi program

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dan berbagai inisiatif serupa di negara lain memiliki landasan filosofis yang sama, yaitu memastikan anak-anak dan kelompok rentan memperoleh asupan gizi adekuat sebagai investasi jangka panjang mutu sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Namun, sebagaimana dipetakan dalam matriks perbandingan pada Tabel 1 mengenai Komponen Input dan Proses, terdapat variasi yang sangat signifikan pada tingkat kematangan sistem, struktur kelembagaan, dan fondasi hukum antardomain negara objek studi.

Di Amerika Serikat, *National School Lunch Program (NSLP)* telah berjalan sejak tahun 1946 dengan legasi regulasi federal yang kokoh melalui *Richard B. Russell National School Lunch Act*. Kedewasaan operasional selama puluhan tahun ini menghasilkan struktur kelembagaan yang stabil di bawah USDA, mekanisme administrasi yang matang, serta sistem

pemantauan berkala yang konsisten. Kondisi mapan ini kontras dengan Program MBG di Indonesia yang baru diinisiasi secara masif melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai program rintisan, MBG Indonesia masih berada pada fase krusial pembangunan sistem (*system building*), di mana standar operasional prosedur (SOP) dan jejaring pengawasan vertikalnya belum sepadu sistem di Amerika Serikat.

Selain memiliki sistem kelembagaan yang matang, program makan sekolah di Amerika Serikat juga menerapkan prinsip penargetan penerima manfaat (*targeted beneficiaries*). Program tidak sepenuhnya diberikan secara universal kepada seluruh siswa, tetapi diprioritaskan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah dan rentan mengalami kerawanan pangan. Pendekatan ini memungkinkan penggunaan anggaran yang lebih efisien sekaligus meningkatkan dampak intervensi terhadap kelompok yang memiliki

risiko gizi tertinggi. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan keseimbangan antara cakupan program dan efektivitas penggunaan sumber daya fiskal.

Kelompok negara dengan sistem tata kelola berbasis lokal yang kuat ditunjukkan oleh Brasil melalui *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) yang diatur lewat *Law No. 11.947/2009*, serta India melalui *Mid-Day Meal Scheme* (MDMS) yang diperkuat undang-undang *National Food Security Act* tahun 2013 (kini bertransformasi menjadi PM POSHAN)(Government of India, 2013).

Kedua negara ini berhasil menginstitusionalisasikan program makan sekolah menjadi hak hukum anak (*legal rights*) yang stabil dan tidak mudah terdampak oleh dinamika pergantian rezim politik. Sebaliknya, Indonesia mengejar ketertinggalan sistem ini dengan menguji coba operasionalisasi unit pelayanan (SPPG) pada 38 provinsi demi merumuskan standarisasi logistik nasional yang andal (BGN, 2025).

Sementara itu, *School-Based Feeding Program* (SBFP) di Filipina (*DepEd Order No. 39 s.2017*) menawarkan perspektif komparatif yang sangat relevan bagi Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi empiris oleh Sadag (2025), tata kelola SBFP sangat bergantung pada kapasitas manajemen internal di tingkat sekolah (*school-based management*). Meskipun komponen teknis seperti higienitas pengolahan pangan dinilai berjalan baik, deviasi luaran gizi tetap terjadi akibat ketimpangan sumber daya. Sintesis komparatif menggunakan pendekatan Sastroasmoro & Ismael

(2024) menunjukkan bahwa hambatan sistemik di Filipina dipicu oleh beban kerja guru yang merangkap tugas operasional serta ketimpangan fasilitas antar-tipe sekolah, seperti sekolah *primary* dan *complete*. Fenomena ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia agar tidak sekedar berfokus pada pemenuhan indikator administratif semata, melainkan harus memastikan kesiapan fasilitas dapur umum dan standarisasi kompetensi tenaga pelaksana di lapangan.

2. Keberhasilan program

Apabila dianalisis berdasarkan komponen Output dan Outcome yang terangkum pada Tabel 2, keberhasilan program makan sekolah secara global dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dampak utama: reduksi kerawanan pangan, peningkatan retensi pendidikan, dan stimulasi ekonomi sirkular lokal bagi seluruh jenjang sasaran peserta didik.

Di Amerika Serikat dan Brasil, program makan sekolah terbukti secara klinis mampu menurunkan tingkat kerawanan pangan (*food insecurity*) secara masif/signifikan pada rumah tangga berpendapatan rendah (Ralston & Coleman-Jensen, 2017; Silva *et al.*, 2023). PNAE Brasil menunjukkan praktik terbaik (*best practice*) di tingkat global dengan mewajibkan minimal 30% anggaran belanja pangan dialokasikan langsung untuk menyerap komoditas dari petani keluarga lokal (Souza & Fornazier, 2022). Kebijakan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan segar, non-olahan, dan bergizi di sekolah, tetapi juga menggerakkan perekonomian pedesaan secara berkelanjutan serta menurunkan jejak emisi karbon logistik pangan. Langkah

serupa kini diadopsi dalam rancangan MBG Indonesia melalui pelibatan UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai mitra strategis penyedia bahan baku lokal (BGN, 2025).

Dari dimensi pendidikan dan kesetaraan sosial, MDMS India diakui oleh lembaga internasional seperti World Bank dan UNICEF sebagai salah satu intervensi sosial terbesar di dunia. Keberhasilan MDMS tidak hanya terukur dari perbaikan status gizi makro, melainkan dari kemampuannya mendongkrak angka kehadiran (*enrolment rate*) siswa perempuan dan menekan angka putus sekolah pada kelompok marginal di seluruh jenjang pendidikan dasar (Afridi, 2010).

Namun, temuan krusial dilaporkan oleh Sadag (2025) di Filipina, yang menunjukkan bahwa status keberhasilan program pada tahap proses (kategori *largely* hingga *fully implemented*) ternyata tidak selaras dengan luaran gizi makro. Penurunan jumlah anak dengan status *wasted* dan *severely wasted* pasca-intervensi dilaporkan tidak signifikan secara statistik ($p=0,303$).

Insight utama dari temuan tersebut mengindikasikan adanya celah intervensi gizi di lingkungan sekolah. Program pemberian makanan tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel tunggal jika tidak dibarengi dengan intervensi sensitif pendukung, seperti penyediaan akses air bersih yang layak, infrastruktur sanitasi sekolah yang higienis, serta edukasi pola hidup bersih sehat (PHBS) yang konsisten bagi seluruh warga sekolah. Evaluasi ini menegaskan bahwa keberhasilan luaran gizi klinis jangka pendek memerlukan ekosistem sekolah yang sehat secara menyeluruh.

3. Permasalahan dan tantangan pelaksanaan

Meskipun menyajikan dampak positif, evaluasi lintas negara mengonfirmasi bahwa tantangan operasional dan struktural selalu membayangi keberlanjutan program makan sekolah. Di Indonesia, MBG sebagai upaya baru berskala nasional menghadapi perbedaan tingkat kesiapan antar-daerah. Ketersediaan dapur dan sarana pendukung belum merata, pelatihan tenaga pelaksana masih terbatas, dan beberapa isu keamanan pangan sempat memengaruhi kepercayaan publik. Selain itu, risiko pemborosan makanan serta belum konsistennya sistem monitoring menjadi tantangan penting dalam menjaga akuntabilitas dan mutu pelaksanaan program.

Tantangan fungsional ini memiliki kesamaan karakteristik di negara berkembang lainnya. Di Brasil, tantangan administratif muncul dari rumitnya birokrasi pengadaan publik serta inkonsistensi kapasitas daerah terpencil dalam memenuhi kuota wajib 30% pasokan dari petani lokal (Silva *et al.*, 2021). Sementara di India, masalah klasik seputar standar higienitas dapur komunitas, kontaminasi pangan, dan lemahnya akuntabilitas distribusi logistik dari hulu ke hilir masih menjadi catatan kritis yang memerlukan digitalisasi pengawasan (PM POSHAN). Filipina menghadapi masalah yang jauh lebih bersifat mikro-lokal, di mana hasil kajian Sadag (2025) mengonfirmasi bahwa keterbatasan ruang makan khusus, ketiadaan peralatan masak standar, serta minimnya partisipasi aktif orang tua melalui *Parent-Teacher Association* (PTA) akibat keterbatasan ekonomi keluarga menjadi kendala utama. Akibatnya, guru-guru sekolah sering

kali mengalami kelelahan peran (*role overload*) karena harus mengajar sekaligus mengelola dapur sekolah, yang pada akhirnya menurunkan konsistensi mutu program.

Secara keseluruhan, kompilasi hambatan lintas wilayah tersebut menunjukkan adanya pola transisi tantangan yang nyata dari masalah fiskal-manajemen pada negara maju ke arah masalah infrastruktur-akuntabilitas pada negara berkembang. Melalui pendekatan studi deskriptif-komparatif (Sastroasmoro & Ismael, 2024), sintesis kritis antardomain negara objek studi ini berhasil mengekstrak faktor kunci keberhasilan (*best practices*) sekaligus titik lemah (*critical flaws*) masing-masing sistem kebijakan yang terekam pada Tabel 1 dan Tabel

Amerika Serikat melalui NSLP memberikan pelajaran bahwa keberlanjutan fiskal dan standarisasi mutu hanya bisa dicapai jika program dilindungi oleh undang-undang federal yang mengikat di bawah kendali lembaga otoritas gizi yang kuat (USDA), meskipun model ini rentan terhadap pembengkakan biaya operasional (Figueroa, 2024). Di sisi lain, Brasil melalui PNAE menawarkan jalan keluar berbasis ekonomi sirkular dengan kewajiban serapan pangan lokal yang efektif memotong rantai logistik dan emisi karbon (Souza & Fornazier, 2022).

Sementara itu, India dengan skala MDMS yang masif membuktikan bahwa jaminan hak pangan mampu mendongkrak retensi sekolah secara nasional, tetapi menyisakan risiko besar pada aspek higienitas dapur komunitas jika tidak didukung digitalisasi sistem pengawasan (Afridi, 2010). Terakhir, kasus SBFP di Filipina

menjadi catatan paling kritis, di mana otonomi manajemen yang terlalu dibebankan pada pihak sekolah justru memicu kelelahan peran guru dan stagnasi luaran klinis gizi akibat buruknya infrastruktur sanitasi dasar di tingkat lokal (Sadag, 2025).

Berdasarkan hasil analisis komparatif ini, posisi Indonesia yang berada pada fase awal implementasi memiliki keuntungan taktis untuk melakukan lompatan kebijakan (*policy leapfrogging*). Berdasarkan data input pada Tabel 1, Indonesia tidak perlu mengulangi kegagalan struktural Filipina yang membebani guru dengan urusan operasional dapur, karena BGN telah menginisiasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mandiri yang terpisah dari struktur pengajaran sekolah. Namun, untuk memitigasi risiko kegagalan proses dan mengoptimalkan *outcome* gizi seperti yang terangkum pada Tabel 2, Pemerintah Indonesia wajib mengadopsi ketegasan regulasi mutu Amerika Serikat serta fleksibilitas afirmasi logistik lokal ala Brasil.

Integrasi pengawasan klinis berkala (pemantauan status gizi) bersama Puskesmas di tingkat tapak harus diperketat. Langkah-langkah strategis ini krusial untuk memastikan bahwa alokasi fiskal yang substansial pada Program MBG tidak sekadar dihabiskan sebagai pengeluaran konsumtif administratif, melainkan bertransformasi menjadi modal pembangunan kesehatan dan ekonomi nasional yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

Tantangan lain yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi MBG adalah luasnya cakupan sasaran program yang mencakup hampir seluruh peserta didik. Dengan

keterbatasan kapasitas fiskal, infrastruktur, dan sumber daya manusia, pendekatan universal berpotensi mengurangi efektivitas intervensi pada kelompok yang paling membutuhkan. Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa penargetan siswa dari keluarga miskin dan rentan pangan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta memperbesar dampak program terhadap perbaikan status gizi dan ketahanan pangan rumah tangga. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan mekanisme prioritas sasaran, terutama pada daerah dengan prevalensi kemiskinan, *stunting*, *wasting*, dan anemia yang tinggi.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Studi komparatif lintas negara ini menegaskan bahwa program makan sekolah merupakan intervensi strategis untuk meningkatkan status gizi, retensi pendidikan, dan ekonomi sirkular lokal. Kunci keberlanjutan program di Amerika Serikat (NSLP), Brasil (PNAE), dan India (MDMS) terletak pada landasan hukum yang mengikat, stabilitas fiskal, kelembagaan yang mandiri, serta pengawasan berbasis data. Sebaliknya, pengalaman SBFP di Filipina (Sadag, 2025) membuktikan bahwa kelancaran administratif di tingkat sekolah tidak serta merta sejalan dengan perbaikan luaran gizi klinis ($p > 0,05$) apabila dibarengi dengan kelelahan peran guru (*role overload*), keterbatasan fasilitas dapur, serta buruknya infrastruktur sanitasi dasar.

Sebagai program rintisan nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia di bawah koordinasi

Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki komitmen politik yang kuat dan potensi perluasan akses pangan lokal yang masif. Namun, program ini masih berada pada fase pembangunan sistem (*system building*) yang dihadapkan pada tantangan ketimpangan infrastruktur antarwilayah (khususnya daerah 3T), variasi kapasitas sumber daya manusia, risiko pemborosan makanan (*food wastage*), serta belum matangnya sistem pemantauan terintegrasi. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari kuantitas cakupan penerima manfaat, melainkan dari konsistensi mutu, higienitas menu, dan keterpaduannya dengan ekosistem kesehatan sekolah secara menyeluruh.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas program makan sekolah tidak hanya ditentukan oleh besarnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh ketepatan sasaran program. Pengalaman Amerika Serikat memperlihatkan bahwa pendekatan yang memprioritaskan siswa dari keluarga miskin dan rentan pangan mampu menghasilkan dampak gizi yang lebih optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Oleh karena itu, dalam jangka panjang implementasi MBG di Indonesia perlu mempertimbangkan strategi afirmatif yang memberikan prioritas kepada kelompok siswa yang paling membutuhkan, khususnya di wilayah dengan tingkat kemiskinan dan masalah gizi yang tinggi.

2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan sintesis komparatif tersebut, beberapa rekomendasi spesifik yang dirumuskan untuk penguatan implementasi Program MBG di Indonesia meliputi:

- a. Pemisahan Peran Operasional Logistik: Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Pendidikan wajib memastikan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dijalankan sepenuhnya oleh tenaga teknis dan kader komunitas terlatih, guna memitigasi risiko kelelahan peran guru agar fokus pendidik tidak terbagi antara mengajar dan mengelola dapur sekolah.
- b. Penyusunan Juknis Afiriasi Logistik Lokal: Menerapkan regulasi yang fleksibel namun akuntabel untuk mempermudah kontrak pasokan bahan pangan segar antara SPPG dengan koperasi desa, UMKM, dan BUMDes, guna mereplikasi kesuksesan sirkular ekonomi berbasis petani keluarga di Brasil.
- c. Digitalisasi Pengawasan dan Pelaporan Terintegrasi: Mengembangkan sistem aplikasi pelaporan berbasis digital (real-time database) untuk memantau rantai pasok logistik harian, mencegah kebocoran anggaran, meminimalkan sisa makanan (food waste), serta menjamin standar keamanan pangan.
- d. Integrasi Intervensi Klinis Sensitif: Menjalankan program pemberian makanan secara ketat dengan intervensi kesehatan lingkungan sekolah melalui penyediaan akses air bersih yang layak, sarana sanitasi yang higienis, serta pemantauan pertumbuhan berkala (Z-score) secara rutin yang terintegrasi dengan Puskesmas setempat.
- e. Penguatan Payung Hukum Jangka Panjang: Mendorong peningkatan regulasi Program MBG dari Peraturan Presiden menjadi Undang-Undang, guna menjamin kepastian alokasi anggaran fiskal yang stabil dan berkelanjutan lintas rezim politik demi pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
- f. Prioritas Sasaran Berbasis Kerentanan Gizi dan Kemiskinan: Pemerintah perlu mempertimbangkan penerapan skema afirmatif secara bertahap dengan memprioritaskan siswa dari keluarga miskin, rentan miskin, dan sekolah yang berada di wilayah dengan prevalensi stunting, wasting, anemia, atau kerawanan pangan yang tinggi. Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif, meningkatkan dampak program terhadap kelompok berisiko tinggi, serta menjaga keberlanjutan fiskal program dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, F. (2010). Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program in India. *Journal of Development Economics*, 92(2), 152–165. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.02.002>
- Afridi, F. (2011). The impact of school meals on school participation: Evidence from rural India. *Journal of Development Studies*, 47(11), 1636–1656. <https://doi.org/10.1080/00220388.2010.514330>
- Azevedo, A. B. C. De, Bandoni, D. H., Amorim, A. L. B. De, & Canella, D. S. (2023). Evaluation of food purchasing in the Brazilian School Feeding Programme: Feasibility of the requirements and recommendations. *Public Health Nutrition*, 26(12), 3331–3342. <https://doi.org/10.1017/S136898002300229X>
- Badan Gizi Nasional [BGN]. (2025). *Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah*

- untuk program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025. <https://ppid.bgn.go.id/>
- Badan Gizi Nasional RI [BGN RI]. (2024). *Petunjuk teknis dan operasional program makan bergizi gratis tahun 2024*. <https://www.bgn.go.id/juknis/lB1PKg-petunjuk-teknis-tata-kelola-penyelenggaraan-program-makan-bergizi-gratis%5D>
- Chakrabarti, S., Scott, S. P., Alderman, H., Menon, P., & Gilligan, D. O. (2021). Intergenerational nutrition benefits of India's national school feeding program. *Nature Communications*, 12(1), Article 4248. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24433-w>
- Dhafir, F., Laenggen, Abd. H., Masriani, M., Tangge, L., Rafiq, R., & Qhatimah, S. H. (2025). Correlation between nutritional knowledge and nutritional status on students' academic achievement. *Prisma Sains: Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*, 13(3), 719–729. <https://doi.org/10.33394/j-ps.v13i3.15420>
- Figueroa, S. (2024). History of the American School Lunch Program. In *Oxford Research Encyclopedia of Food Studies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780197762530.013.13>
- Global Child Nutrition Foundation. (2021). *School meal programs around the world: Report on the 2019 Global Survey of School Meal Programs*. <https://gcnf.org/wp-content/uploads/2021/04/GCNF-2019-Global-Survey-Report.pdf>
- Government of India. (2013). *The National Food Security Act, 2013 (Act No. 20 of 2013)*. The Gazette of India, Ministry of Law and Justice. https://dfpd.gov.in/WriteReadData/Other/nfsa_1.pdf
- Irab, S. P., Flassy, M., Zainuri, A., Sinaga, E., Hidayat, R. R., Wandik, Y., & Putra, M. F. P. (2024). Determinants of nutritional status, students' learning achievement and physical activity: A cross sectional study in Jayapura City, Papua, Indonesia. *Retos*, 58, 485–494. <https://doi.org/10.47197/retos.v58.107422>
- Kluczkovski, A., Menezes, C. A., Tereza da Silva, J., Bastos, L., Lait, R., Cook, J., Cruz, B., Cerqueira, B., Lago, R. M. R. S., Gomes, A. N., Ladeia, A. M. T., Rivera, X. S., Vianna, N., Reynolds, C. J., Oliveira, R. R., & Bridle, S. L. (2022). An environmental and nutritional evaluation of school food menus in Bahia, Brazil that contribute to local public policy to promote sustainability. *Nutrients*, 14(7). <https://doi.org/10.3390/nu14071519>
- Ministry of Education. (2022). *Guidelines on Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN) scheme*. Government of India. <https://pmposhan.education.gov.in>
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas program makan bergizi gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380/349>
- Ralston, K., & Coleman-Jensen, A. (2017). *USDA's National School Lunch Program reduces food insecurity*. <https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2017/august/usda-s-national-school-lunch-program-reduces-food-insecurity/>
- Sadag, M. D. D. (2025). The extent implementation of School-Based Feeding Program: An assessment among elementary schools in Kabugao District II, Philippines. *Journal of Education, Society and Behavioural Science*, 38(4), 60–76. <https://doi.org/10.9734/jesbs/2025/v38i41401>
- Sastroasmoro, S., & Ismael, S. (2024). *Dasar-dasar metodologi penelitian klinis* (6th ed., Vol. 7). CV. Sagung Seto.
- Silva, E. A. da, Pedrozo, E. A., & Silva, T. N. da. (2023). National School Feeding Program (PNAE): A public policy that promotes a learning framework and a more sustainable food system in Rio Grande do Sul, Brazil. *Foods*, 12(19). <https://doi.org/10.3390/foods12193622>
- Silva, J. A. T. D., Lopes, A. F., Rebelo, K. S., & Santana, A. B. C. (2021). Avaliação de compras públicas e especificações de gêneros alimentícios para o Programa Nacional de Alimentação Escolar em um município no interior do estado do

- Amazonas, Brasil. *Research, Society and Development*, 10(8), e30010817213.
<https://doi.org/10.33448/rsd-v10i8.17213>
- Souza, A., & Fornazier, A. (2022). Case study of the school feeding program in Distrito Federal, Brazil: Building quality in short food supply chains. *Sustainability*, 14(16).
<https://doi.org/10.3390/su141610192>
- Sulistyono, D., Rahayu, H. S. E., & Masithoh, R. F. (2020). The nutrition status and learning achievement of Mertoyudan Muhammadiyah Innovative Elementary School's students. *Media Keperawatan Indonesia*, 3(3), 186-190.
<https://doi.org/10.26714/mki.3.3.2020.186-190>